

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pembiayaan Utang, dan Ukuran Legislatif terhadap Akuntabilitas Bantuan Sosial bertujuan untuk:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas bantuan sosial.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan utang terhadap akuntabilitas bantuan sosial.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran legislatif terhadap akuntabilitas bantuan sosial.

#### **B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dalam penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pembiayaan Utang, dan Ukuran Legislatif terhadap Akuntabilitas Bantuan Sosial” ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat daerah kota/kabupaten provinsi Jawa Timur periode tahun 2011-2013.

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu (Suryana, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linear berganda. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2011-2013.

#### **D. Populasi dan Sampling, Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Populasi**

Menurut Suharyadi (2009), populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

##### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), yaitu:

- a. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan laporan keuangan pada tahun anggaran 2011-2013 secara lengkap dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

- b. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2011-2013.
- c. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pendanaan yang berasal dari utang pada tahun anggaran 2011-2013.

Provinsi Jawa Timur dipilih karena peneliti menemukan adanya masalah mengenai bantuan sosial di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

## **E. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

### **1. Variabel Dependen**

Menurut Sugiyono (2013) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas bantuan sosial.

#### **1.1 Definisi Konseptual**

Akuntabilitas bantuan sosial adalah pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah atas pelaksanaan belanja bantuan sosial sebagai kewajiban yang dilaksanakan untuk memenuhi hak dari pihak yang memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban. Peneliti menggunakan akuntabilitas keuangan untuk mengukur variabel ini. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk

membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

## 1.2 Definisi Operasional

Dalam variabel ini, peneliti mengukur pengungkapan belanja sosial yang ada pada catatan atas laporan keuangan berdasarkan indikator belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan buletin teknis SAP Nomor 10. Dalam Bultek SAP No. 10 tersebut dijelaskan mengenai pengungkapan belanja bantuan sosial dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) berisikan tentang:

- e. Rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
- f. Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama
- g. Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- h. Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*.

Pada penelitian sebelumnya yang meneliti pengungkapan belanja bantuan sosial pada LKPD tahun 2009 (Darmastuti, 2012) menggunakan metode *dummy* untuk mengukur pengungkapan belanja bantuan sosial. Hal ini dilakukan karena berdasarkan tahun objek penelitian, yaitu tahun 2009 belum ada peraturan mengenai belanja bantuan sosial. Dalam penelitian kali ini, peneliti

menyesuaikan pengukurannya karena telah diterbitkan Bultek SAP No. 10 oleh KSAP mengenai Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Peneliti menggunakan skoring peringkat untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban bantuan sosial yang dinyatakan dengan banyaknya jumlah jenis pengungkapan bantuan sosial yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan skala ordinal menggunakan angka dari 1 sampai dengan 4 sesuai dengan jumlah jenis pengungkapan yang disajikan dalam CALK.

**Tabel III.1**  
**Tabel Peringkat**

Jumlah Jenis Pengungkapan yang disajikan	Peringkat
1 jenis	1
2 jenis	2
3 jenis	3
4 jenis	4

Sumber: diolah oleh penulis (2015)

## **2. Variabel Independen**

### **2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

#### **2.1.1. Definisi Konseptual**

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP No.60 Tahun 2008).

### 2.1.2 Definisi Operasional

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian (terdiri dari 8 item)
2. Penilaian risiko (terdiri dari 2 item)
3. Kegiatan pengendalian (terdiri dari 11 item)
4. Informasi dan komunikasi (terdiri dari 2 item)
5. Pemantauan pengendalian intern (terdiri dari 3 item)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diukur menggunakan skoring pengungkapan berdasarkan ada/tidaknya unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang terdapat dalam PP No. 60 Tahun 2008 yang berjumlah 26 dalam sebuah CALK. Sistem pengendalian internal pemerintah diukur dengan menggunakan pendekatan *disclosure scoring*, yaitu jika sebuah entitas pelaporan mengungkapkan item yang terdapat dalam daftar, maka diberi nilai 1 (satu), dan jika tidak mengungkapkan maka diberi nilai 0 (nol) (Cooke, 1989 dalam Suhardjanto, 2011).

Selanjutnya setiap item dijumlah seluruhnya dan dibagi dengan jumlah total unsur SPIP. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{SPIP} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{26}$$

## 2.2. Pembiayaan Utang

### 2.2.1 Definisi Konseptual

Renyowijoyo (2010), untuk membiayai penyelenggaraan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman utang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, dan masyarakat atau bisa juga menerbitkan obligasi daerah dengan persetujuan DPRD. Menurut Nordiawan (2012) kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan di mana pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan aset.

### 2.2.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur tingkat pembiayaan utang dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). DER bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mempergunakan uang yang dipinjamnya tersebut (Van Horne dan Wachowicz, 2005).

*Debt to equity ratio* dapat diukur dengan rumus berikut:

$$Debt\ ratio = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

### **2.3. Ukuran Legislatif**

#### **2.3.1 Definisi Konseptual**

Menurut Winarna dan Murni (2007) dalam Suhardjanto (2011), lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

#### **2.3.2 Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini ukuran legislatif diukur dengan menggunakan jumlah anggota DPRD yang terdapat pada tingkat kabupaten/kota.

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah anggota DPRD}$$

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2013) yang dimaksud statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul



sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Menilai Model Fit

Uji ini dilakukan untuk menerangkan apakah dengan memasukkan variabel independen dalam model akan memberikan kontribusi pada model dengan melihat hasil Chi-Square. Apabila hasil uji menunjukkan penurunan nilai *Chi-Square* yang terlihat pada penurunan nilai *-2 Log Likelihood*, serta signifikansi pada taraf nyata 5%, maka dengan adanya pemasukan variabel independen dalam model memberikan kontribusi pada model tersebut (Yamin dan Kurniawan, 2011: 122).

### b. Menilai *Goodness-of-Fit*

Uji ini menunjukkan kesesuaian model dengan data empiris dimana hipotesis nol adalah data hasil prediksi model sesuai dengan data empiris. Hipotesis untuk menilai model fit adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model yang dihipotesakan fit dengan data

$H_A$  : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Apabila hasil nilai statistik *Goodness-of-Fit* Pearson dan Deviance sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model tidak fit. Namun jika nilai statistik *Goodness-of-Fit*

lebih besar dari 0,05, maka model tersebut mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima atau fit dan layak digunakan (Yamin dan Kurniawan, 2009: 122).

**c. Menilai Pseudo R-Square**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat variabilitas variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independennya (Yamin dan Kurniawan, 2009: 122). Pseudo R-Square dilihat dari nilai Cox dan Snell R Square dan Nagelkerke R square.

Cox dan Snell R Square merupakan ukuran yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan, sementara Nagelkerke R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell R Square yang menjelaskan variabel dependen dari variabilitas variabel independennya. (Ghozali, 2011: 341).

**d. Uji *Parallel Lines***

Uji *parallel lines* digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit. Apabila nilai  $p > 0.05$ , maka menunjukkan bahwa *link function* logit yang dipilih telah sesuai. Adanya hasil nilai  $< 0.05$  menunjukkan ketidakcocokan model yang dapat disebabkan oleh kesalahan dalam memilih *link function* (Yamin dan Kurniawan, 2011: 123).

### 3. Analisis Regresi Ordinal Logistik

Regresi Ordinal digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana variabel dependen berskala ordinal (data tingkatan, ranking) (Yamin dan Kurniawan, 2011:119). Model persamaan regresi ordinal logistik yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

$$\text{Logit}(p_1) = \text{Log} \frac{p_1}{1 - p_1} = \alpha_1 + \beta'X$$

$$\text{Logit}(p_1+p_2) = \text{Log} \frac{p_1 + p_2}{1 - p_1 - p_2} = \alpha_1 + \beta'X$$

$$\text{Logit}(p_1+p_2+\dots+p_k) = \alpha_1 + \beta_1\text{SPI} + \beta_2\text{PU} + \beta_3\text{Leg}$$

Keterangan:

P = Probabilitas tingkat akuntabilitas bantuan sosial dengan jumlah jenis pengungkapan

$\alpha$  = *estimated*

$\beta_{1-3}$  = *intercept*

SPI = Variabel independen Sistem Pengendalian Internal

PU = Variabel independen Pembiayaan Utang

Leg = Variabel independen Ukuran Legislatif

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat *parameter estimastes* yang menunjukkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Apabila nilai signifikansinya  $< 0.05$ , maka hal tersebut menunjukkan variabel indepen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Yamin dan Kurniawan, 2011: 122)